

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Tidak Boleh Cari Panggung

Dewan Desak Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Satu Visi

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI duduk bersama untuk merumuskan solusi penanggulangan wabah Corona. Ia tidak ingin proses penanggulangan Covid-19 hanya jadi masalah politik. "Ini masalah kemanusiaan. Ini harus sudah tidak boleh berpikir politik, apalagi cari panggung," kata Wibi di Jakarta, Kamis (2/3/2020).

Menurutnya, sejauh ini Pemerintah Pusat belum memiliki rencana yang jelas dalam menanggulangi wabah Corona, terutama di Jakarta. Bahkan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sering kali berbeda pendapat dalam menanggulangi Covid-19. Salah satunya ialah usulan untuk membatasi angkutan umum yang telah diinisiasi Pemprov DKI. Namun usulan tersebut tak direstui Kementerian Perhubungan.

"Kalau Pak Luhut (Binsar Panjaitan) sebagai Plt Kemenhub mencabut yang

telah diinisiasi DKI, sekarang harus dijelaskan ke Pemprov DKI. Terutama Pak Luhut, ya. Apa solusi pemerintah pusat yang diberikan dalam (menanggulangi) penyebaran pandemi ini," tutur Wibi. Selain itu, pemerintah pusat juga telah menolak surat Pemprov DKI yang mengajukan kebijakan karantina wilayah. Menurut Wibi, kebijakan karantina wilayah merupakan yang paling tepat untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Corona.

"Sekarang apa yang harus dilakukan DKI," kata Wibi. Menurut dia, penyebaran virus Corona sudah sangat mengkhawatirkan di ibu kota. Berdasarkan catatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sudah lebih dari 200 orang yang dimakamkan sesuai protokol penanganan Covid-19.

"Ini ada perbedaan data antara Kemenkes dan Dinas Pemakaman. Bolehlah kami lihat data pemerintah pusat, tapi kan di lapangan berbeda. Ini kan polemik sendiri di Jakarta," ujarnya.

Wibi menuturkan saat ini telah banyak perkampungan yang akhirnya menjalankan kebijakan sendiri dengan mengkarantina wilayah mereka sendiri. Menurut dia, masalah ini menjadi serius karena masyarakat



Karena kalau tidak ada kesamaan visi antara daerah dan pusat, yang jadi korban rakyatnya.

*Wibi Andriano
Ketua Fraksi Partai Nasdem
DPRD DKI Jakarta*

jadi menjalankan aturan karena tidak adanya kejelasan peraturan dari pemerintah. Nasdem pun berharap antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bisa segera duduk bersama kembali untuk menentukan kebijakan yang pasti dalam menanggulangi wabah Corona.

"Karena kalau tidak ada kesamaan visi antara daerah dan pusat, yang jadi korban rakyatnya. Rakyat bingung mau mengikuti yang mana," tegasnya. Pajak Anjlok

DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD). Rapat diadakan terkait penurunan pajak Pemprov DKI selama masa pandemi virus Corona (COVID-19).

"Kita sedang mencari formula untuk

mengundang TAPD untuk mengadakan rapat. Artinya formula, apakah rapatnya kita melalui teleconference, apakah nanti rapat langsung melalui tatap muka dengan mengedepankan sosial distancing dan physical distancing," ujar anggota komisi C DPRD DKI Andyka.

Dia menuturkan, rapat tersebut dimaksud untuk mengetahui anggaran daerah yang saat ini tersedia. Serta kemungkinan pengurangan anggaran untuk penanganan Corona. "Jadi kami ingin mengetahui berapa anggaran yang saat ini tersedia, kemudian sektor-sektor mana belanja yang nanti akan kita kurangi dan akan dimatikan kegiatannya," kata Andyka.

Andyka mengatakan pendapatan pajak pasti turun. Salah satu sek-

tor pajak yang turun yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak penerangan jalan umum. "Apa yang disampaikan oleh saudara Gubernur itu sudah pasti menurun, kenapa demikian dari 14 sektor pajak yang sudah kita ketahui pasti mengalami penurunan. Dua pajak yang berasal dari dana perimbangan, yaitu PBBKB pajak bahan bakar kendaraan bermotor, otomatis itu mengalami penurunan," ujarnya. Hal tersebut karena dengan parsial lockdown atau pembatasan-pembatasan yang dibuat penggunaan bahan bakar otomatis berkurang. "Mungkin yang tetap ada, tapi mengalami penurunan juga yaitu pajak penerangan jalan umum," paparnya.

Andyka juga menyebut beberapa sektor pajak lain pasti turun yaitu, pajak hotel, rumah makan hingga hiburan. "Kemudian sektor yang lain yang mengalami penurunan disamping dua sektor objek pajak tersebut, yaitu BBNKB biaya balik nama kendaraan bermotor, kenapa karena kan otomatis mengalami keterlambatan. Kemudian pajak hotel, pajak rumah makan, termasuk pajak hiburan," tuturnya. (dni)